

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah pusat memiliki peran strategis dalam mengatur masyarakat yang ada di pedesaan guna mewujudkan pembangunan pemerintahan. Kebijakan ini dilakukan guna mendukung kemandirian desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dimana menjelaskan bahwa desa mendapat kucuran dana sebesar 10% dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara).<sup>1</sup> Setiap desa diberi tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangannya sendiri dan menyediakan informasi yang nantinya dijadikan pedoman sebagai penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Desa berkewajiban untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan sumber pendapatan desa dalam laporan realisasi pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes sesuai dengan format yang telah ditentukan dan standar akuntansi desa yang berlaku. Berbagai laporan harus dihasilkan tepat waktu dalam kurun waktu yang sudah ditentukan sebagai laporan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah atau masyarakat.

Oleh sebab itu, pemerintah desa harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan apa adanya sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik (*Good Village Governance*).<sup>2</sup> Tata kelola pemerintah yang baik ada sebagai tuntutan masyarakat yang wajib dilengkapi. Wujudnya yaitu adanya keterbukaan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Tuntutan akuntabilitas ini berlaku bagi segenap unsur pemerintah termasuk desa sebab desa menjadi unsur pelaksana aktivitas yang berhubungan langsung dengan warga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, ed. Mona (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 121.

<sup>2</sup> I Made Deva Premana Dharma Wiguna, Gede Adi Yuniarta, dan Made Aristia Prayudi, "Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng)," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha* 8, no. 2 (2018): 2, <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13277>.

<sup>3</sup> Sry Anita Gusasi dan Felmi D. Lantowa, "Analisis Penerapan Aplikasi Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Di Desa

Akuntabilitas merupakan bentuk menghasilkan tanggung jawab terkait kegiatan yang akan atau sudah dilakukan sebagai jalan pemerintah desa memberikan laporan kepada masyarakat. Tidak semata-mata hanya tentang keuangan melainkan informasi lainnya dalam perspektif ekonomi, sosial, dan politik. Masyarakat memiliki tuntutan besar untuk pemerintah desa akan akuntabilitas dan transparansi. Akan tetapi pemerintah sering melalaikan karakteristik akuntabilitas untuk pengelolaan desa.<sup>4</sup>

Karakter ini menunjukkan adanya keadilan dan keseimbangan dalam membangun desa menuju pembangunan negara. Urgensitas tentang pengelolaan dana desa mendapatkan kedudukan strategis untuk dikritisi dan diperdebatkan. Hal ini disebabkan pembangunan daerah sebagai parameter pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>5</sup>

Menurut penelitian Napisah dan Taufiqurachman menyatakan bahwa Akuntabilitas publik dan transparansi berpengaruh secara stimulan terhadap pengelolaan dana desa, hal itu ditunjukkan dengan adanya pertanggungjawaban setiap tugas dan wewenang yang sesuai dan dengan adanya keterbukaan informasi yang semestinya.<sup>6</sup> Penelitian lain dari Juardi dkk., juga menyatakan bahwa kualitas akuntabilitas membawa perubahan baik untuk desa karena mempermudah proses pertanggungjawaban dan memberikan hasil peningkatan kualitas desa yang baik.<sup>7</sup>

---

Huyula,” JSAP : Journal Syariah and Accounting Public 4, no. 1 (July 15, 2021): 16, <https://doi.org/10.31314/jsap.4.1.15-23.2021>.

<sup>4</sup> Sri Karlinayani dan Endang Surasetyo Ningsih, “Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Gayo Lues),” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 3, no. 2 (2018): 310, <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/10556>.

<sup>5</sup> Nur Asia Usman Betan dan Paskah Ika Nugroho, “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa,” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora* 5, no. 1 (2021): 135, <https://doi.org/10.23887/jppsh.v5i1.33246>.

<sup>6</sup> Lilis Saidah Napisah dan Cecep Taufiqurachman, “Model Pengelolaan Dana Desa Melalui Prinsip Akuntabilitas Publik Dan Transparansi Di Kabupaten Bandung,” *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)* 6, no. 2 (July 31, 2020): 79–88, <https://doi.org/10.38204/jrak.v6i2.397>.

<sup>7</sup> Muhammad Sapril Sardi Juardi, Mustakim Muchlis, dan Reski Amalia Putri, “Evaluasi Penggunaan Aplikasi Siskeudes Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 4, no. 1 (july 30, 2018): 84–107, <https://doi.org/10.24252/jiap.v4i1.5159>.

Namun menurut penelitian Mada., dkk mengungkapkan akuntabilitas dapat juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat.<sup>8</sup> Dikarenakan partisipasi masyarakat penting dalam menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Partisipasi masyarakat merupakan antusiasme masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada dalam masyarakat serta pengambilan keputusan tentang solusi dalam mengatasi masalah dan keterlibatannya dalam evaluasi perubahan yang telah terjadi.

Penelitian terkait partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat yang tinggi.<sup>9</sup> Masyarakat sebagai pemilik dana seharusnya mengetahui penggunaan dana desa dan pemanfaatannya. Partisipasi dan pengawasan dari masyarakat dalam penggunaan dana dimaksudkan agar tujuan dana desa dalam menciptakan desa mandiri dapat terwujud.

Masyarakat belum begitu memahami pentingnya akuntabilitas keuangan desa dan tidak mengetahui bagaimana dana desa digunakan serta untuk kebutuhan apa dana itu dimanfaatkan. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Maharani dan Akbar penelitian ini memiliki keterbatasan pengungkapan data berkaitan dengan akuntabilitas terhadap masyarakat karena sebagian besar masyarakat tidak begitu memperhatikan akuntabilitas atas penggunaan uang desa.<sup>10</sup>

Syarat yang diberikan dari para pemegang saham, baik pemerintah pusat maupun masyarakat membuat pemerintah desa harus melaporkan pemakaian keuangan yang diterima dan

---

<sup>8</sup> Sarifudin Mada, Lintje Kalangi, dan Hendrik Gamaliel, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill”* 8, no. 2 (August 3, 2017): 106–15, <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>.

<sup>9</sup> Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi dan Gayatri, “Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *E-Jurnal Akuntansi* 26, no. 2 (February 10, 2019): 1269, <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>.

<sup>10</sup> Dinda Novyasaki Maharani dan Fajar Syaiful Akbar, “Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa,” *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 1 (June 25, 2020): 1–20, <https://doi.org/10.33005/baj.v3i1.55>.

direalisasikan dalam APBDes. Hal tersebut dilakukan agar semakin kuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, menghindarkan dari isu-isu yang mungkin didengar oleh masyarakat entah itu dari luar desa maupun cerita yang berkembang dalam desa itu sendiri yang dapat membuat masyarakat berpikir buruk terhadap penyelenggaraan pemerintah yang ada terhadap penggunaan keuangan yang diterima.

Proses penyusunan dan pengelolaan keuangan sampai tersaji informasi guna membantu pihak berwenang diperlukan adanya sistem akuntansi yang mengatur klasifikasi, pengukuran, dan keseluruhan transaksi yang harus diungkap dengan lengkap. Penyusunan laporan keuangan dikerjakan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola keuangan desa dan memiliki kompetensi di bidang sistem akuntansi.

Laporan keuangan disusun guna menyediakan informasi yang efektif dan relevan mengenai transaksi keuangan dan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebuah entitas pelaporan. Seiring dengan adanya reformasi di bidang keuangan maka diperlukan perubahan pada berbagai bidang keuangan Negara agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan signifikan yaitu perubahan dalam bidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.<sup>11</sup> Banyaknya laporan keuangan desa yang harus dihasilkan dalam satu periode akuntansi tanpa menggunakan teknologi informasi dengan terbatasnya jumlah aparatur desa, terkadang menyebabkan waktu lebih lama pelaporannya serta laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan format atau ketentuan karena terbatasnya waktu yang dimiliki.

Hasil penelitian Widagdo., dkk menyebutkan salah satu faktor penyebab tingginya potensi korupsi dana desa adalah rendahnya pemahaman akuntansi.<sup>12</sup> Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan akuntansi perlu dilaksanakan mengingat akuntansi memiliki peran

---

<sup>11</sup> Sulistyowati, Norita Citra Y, dan Elok Fitriyah, "Implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Studi Kasus Pada Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo," *International Journal of Social Science and Business* 3, no. 3 (September 20, 2019): 300, <https://doi.org/10.23887/ijssb.v3i3.21056>.

<sup>12</sup> Ari Kuncara Widagdo, Siti Rochmah Ika, dan Sena Satria, "Determinants of Intention to Use Siskeudes: Extended of Decomposed Theory of Planned Behavior Model," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 20, no. 1 (February 27, 2020): 40, <https://doi.org/10.20961/jab.v20i1.507>.

dalam pengelolaan keuangan terutama dalam tata kelola keuangan pemerintah pusat, daerah dan desa. Penelitian dari Sayyida dan Riharjo juga menyatakan bahwa kemampuan sumber daya manusia dalam pemahaman akuntansi merupakan faktor utama yang penting terhadap pengelolaan keuangan.<sup>13</sup> Diharapkan dengan adanya penerapan akuntansi yang baik diikuti dengan pemahaman pengelola dapat menjadikan pelaporan menjadi baik, tidak terjadi kendala dan masalah.

Seiring dengan perkembangan teknologi yang memasuki bidang akuntansi dalam hal pengelolaan keuangan desa, BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) bersama Kementerian dalam negeri (Kemendagri) membangun sebuah aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pada tahun 2015. Berharap mempermudah pekerjaan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa dalam mengawal transparansi pengelolaan keuangan desa. Pencapaian keterbukaan pengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat terwujud dengan penerapan siskeudes yang diterapkan secara baik agar nantinya dapat meningkatkan kualitas tata kelola keuangan.

Menurut penelitian Aziiz dan Prastiti menyimpulkan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.<sup>14</sup> Pemanfaatan teknologi dalam proses pelaporan keuangan lebih cepat dan mudah diakses sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian oleh Indraswari dan Rahayu juga menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.<sup>15</sup>

Sebelum adanya Siskeudes dalam proses membuat penganggaran, penatausahaan dan laporan keuangan masih secara manual menggunakan *Microsoft Excel* dengan format yang belum sesuai dengan standar. Hal ini membuat pemerintah sulit melakukan

---

<sup>13</sup> Nurus Sayyida dan Ikhsan Budi Riharjo, "Peran Akuntansi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 10 (2020): 1–13, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3662>.

<sup>14</sup> Muhammad Nur Aziiz and Sawitri Dwi Prastiti, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa," *Jurnal Akuntansi Aktual* 6, no. 2 (July 29, 2019): 334–44, <https://doi.org/10.17977/um004v6i22019p334>.

<sup>15</sup> Nafadhila Eka Indraswari dan Yuliasuti Rahayu, "Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* 10, no. 4 (2021): 1–15, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/3866>.

proses evaluasi APBDes dalam laporan keuangan desa sehingga diterapkannya Siskeudes agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik. Hasil dari penelitian Nur Anita menunjukkan kendala yang dihadapi saat masih menggunakan aplikasi manual, dalam menyelesaikan tugas memerlukan waktu yang banyak karena harus manual dan rinci jika ada kesalahan harus memeriksa dari awal.<sup>16</sup>

Berdasarkan penelitiannya Malahika., dkk menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem keuangan desa telah berjalan baik dan prosedur pemanfaatan Siskeudes telah dilakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan dengan empat tahapan yaitu perencanaan, penyelenggaraan, penatausahaan dan pelaporan. Namun masih memiliki kendala dalam penerapannya yaitu sering terjadi masalah error pada saat penginputan dan masih terdapat beberapa laporan yang belum terinput ke sistem dan masih menggunakan laporan secara manual.<sup>17</sup>

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian Assyahri dan Vaguita yang menyatakan penggunaan aplikasi siskeudes sudah cukup baik dilihat dari aspek efisiensi, efektif dan kesesuaian dalam aplikasi tersebut melalui tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan sedangkan dalam tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban belum efektif. Pelaksanaannya masih ada kendala yang ditemukan, diantaranya yaitu kurangnya sumber daya manusia, pelatihan dari pihak kabupaten belum maksimal, terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan partisipasi masyarakat yang masih kurang.<sup>18</sup>

Penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian Welley., dkk menunjukkan bahwa sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi siskeudes dengan adanya siskeudes perencanaan, pelaksanaan,

---

<sup>16</sup> Rozita dan Nur Anita, "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Akuntansi Oleh Bendaharawan Sebelum Dan Sesudah Penerapan SISKEUDES Di Kecamatan Bengkalis," *Jurnal IAKP* 1, no. 2 (2020): 97–106, <https://doi.org/10.35314/v1i2.1494>.

<sup>17</sup> Jehan M. Malahika, Herman Karamoy, dan Rudy J. Pusung, "Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara)," *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi* 13, no. 4 (December 31, 2018): 578–83, <https://doi.org/10.32400/gc.13.04.21514.2018>.

<sup>18</sup> Mercya Vaguita dan Wahib Assyahri, "Evaluasi Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Di Kecamatan 2X11 Kayu Tanam," *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 18, no. 2 (April 15, 2020): 79-91, <https://doi.org/10.35967/jipn.v18i2.7844>.

penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa menjadi lebih baik selain itu transparansi keuangan desa serta kecepatan dalam pelaporan menjadi lebih cepat dan lebih baik.<sup>19</sup> Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian Julianto dan Dewi yang menyatakan penggunaan siskeudes berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa.<sup>20</sup>

Siskeudes merupakan hal penting dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga dengan penerapannya aplikasi tersebut diharapkan membawa perubahan lebih baik bagi pengelolaan keuangan desa kedepannya, serta bisa menjadi solusi bagi aparat desa untuk lebih transparan dan akuntabel dalam menjalankan kegiatan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan tujuan penerapan aplikasi tersebut.

Namun dalam penelitian Martini., dkk ditemukan penerapan aplikasi siskeudes belum optimal. Faktor sumber daya manusia menjadi yang paling berperan dalam hal ini.<sup>21</sup> Perangkat desa yang berperan dalam pengoperasian siskeudes kurang memahami aplikasi tersebut. Perangkat desa tersebut seringkali lupa tahap-tahap penginputan data. Pengoperasian aplikasi ini masih dianggap rumit oleh perangkat desa, karena perangkat desa kurang memiliki pengetahuan tentang anggaran desa, ini menjadi terlihat kebingungan oleh perangkat desa yang bersangkutan ketika melakukan penginputan data APBDes dalam aplikasi siskeudes.

Melalui penerapan aplikasi siskeudes diharapkan dapat meminimalkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemerintah daerah dan mampu menciptakan prestasi dalam penerapan siskeudes di setiap desa yaitu menghasilkan laporan yang diperlukan, sehingga menghemat waktu dan mengurangi potensi kecurangan dan kesalahan dalam penginputan. Namun, realita yang ada menurut data ICW menunjukkan terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa dari

---

<sup>19</sup> Morenly Marchel Welley, Rosalina A.M. Koleangan, dan George M.V. Kawung, "Perbandingan Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Aplikasi Siskeudes Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Desa," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah* 19, no. 4 (2018): 79–91, <https://doi.org/10.35794/jpekd.32768.19.4.2018>.

<sup>20</sup> I Putu Julianto dan Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Penggunaan Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Pendamping Desa Serta Komitmen Pemerintah Daerah Terhadap Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 4, no. 1 (June 5, 2019): 24–42, <https://doi.org/10.23887/jia.v4i1.17242>.

<sup>21</sup> Rita Martini et al., "Pengelolaan Keuangan Berbasis Aplikasi Sistem Keuangan Desa," *JPKM (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 25, no. 2 (October 18, 2019): 69-74, <https://doi.org/10.24114/jpkm.v25i2.13916>.

271 kasus penyelewengan selama 2019. Dari pantauan ICW (Indonesia *Corruption Watch*) ada sekitar 330 pada sepanjang tahun 2021.<sup>22</sup>

Peneliti ICW mengatakan banyaknya korupsi dana desa ini menunjukkan belum adanya sistem yang secara komprehensif dilakukan atau dibuat oleh pemerintah dalam hal pengawasan dana desa.<sup>23</sup> Menurut ICW berbagai faktor yang menjadi penyebab korupsi di sektor desa diantaranya minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya kompetensi kepala desa dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa.<sup>24</sup>

Desa Kirig Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus yaitu salah satu desa yang telah menerapkan aplikasi Siskeudes sejak tahun 2016. Sistem ini membantu pemerintah desa mengelola keuangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban keuangan desa harus sesuai dengan peraturan yang ada. Sebelum adanya sistem keuangan desa, pemerintah desa Kirig membuat laporan keuangannya dengan sistem manual atau dengan aplikasi Microsoft excel, namun cara tersebut dianggap kurang efektif dalam penyusunan laporan keuangan dikarenakan data yang sering hilang. Pendamping desa juga mengungkap pembuatan laporan keuangan dengan sistem manual rawan untuk dimanipulasi karena tidak ada pengawasan yang ketat dalam prosesnya.

Pada awal pelaksanaannya siskeudes dirasa sulit bagi pemerintah desa Kirig karena operator bukan merupakan ahli dalam teknologi informasi dan proses memasukkan data masih terdapat beberapa kesalahan karena ketidak pemahaman pemerintah desa. Selain itu, dalam operasionalnya aplikasi siskeudes membutuhkan perangkat

---

<sup>22</sup> Moh Khory Alfarizi, "ICW Minta LPSK Dampingi Pelapor Kasus Korupsi Dana Desa Di Cirebon," *Tempo.co*, (Jakarta, 2022), <https://nasional.tempo.co/read/1563139/icw-minta-lpsk-dampingi-pelapor-kasus-korupsi-dana-desa-di-cirebon>.

<sup>23</sup> Ardito Ramadhan, "Catatan ICW, Kasus Korupsi Dana Desa Terbanyak Muncul Pada 2019," *kompas* (Jakarta, 2020), <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/18/19084421/catatan-icw-kasus-korupsi-dana-desa-terbanyak-muncul-pada-2019>.

<sup>24</sup> Indonesian Corruption Watch, "Outlook Dana Desa 2018 Potensi Penyalahgunaan Anggaran Desa Di Tahun Politik," *Www.Antikorupsi.Org*, no. 6 (2018), <https://antikorupsi.org/id/article/outlook-dana-desa-2018-potensi-penyalahgunaan-anggaran-desa-di-tahun-politik>.

komputer dan koneksi internet yang mendukung, namun di Desa Kirig sendiri koneksi internet pun masih dikategorikan kurang stabil juga diperlukan sumber daya yang mendukung terkait dengan penerapannya. Setiap tahunnya terdapat perubahan versi dalam aplikasi dimana itu dirasa sulit bagi operator untuk mengikuti dari awal mengaplikasikannya.

Mekanisme atau aturan pelaporan keuangan melalui siskeudes yang berubah-ubah setiap tahunnya terutama terkait dengan penempatan akun, perubahan berupa pembaharuan aplikasi. Meskipun diadakan pelatihan kembali namun rasanya kurang efektif ketika operator mulai menguasai versi yang lama dan setelah itu kemudian mengalami perubahan lagi. Dalam hal ini, penerapan siskeudes membutuhkan sumber daya manusia yang baik, koneksi internet yang baik dan juga kerjasama penuh dengan bagian BPKP.

Melihat kondisi di desa tersebut sangat memungkinkan ketidakefektifan dalam penerapan aplikasi Siskeudes, dan jika penerapannya tidak efektif bagaimana kemudian peran dari aplikasi tersebut dan bagaimana pemerintah dapat mengelola keuangannya dengan baik. Sedangkan dari pemerintah dituntut untuk dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabilitas.

Sistem keuangan desa memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk mendapatkan informasi lebih luas dan mendorong mereka untuk berperan dalam menyampaikan informasi. Sistem ini memudahkan pemerintah desa dalam melakukan program desa, dengan semakin berat dan kompleks tugas pemerintah desa yang terjadi di desa, sistem informasi dan komunikasi menjadi pendukung desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, kredibel dan mempermudah partisipasi masyarakat sehingga pada proses pengelolaan sistem keuangan desa harus lebih diperhatikan.

Melihat dari beberapa masalah yang ada tentu saja hal ini masih menjadi indikasi atau potensi yang masih bisa ditemukan dalam proses akuntabilitas keuangan di desa. Sehubungan dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan perbedaan hasil yang berbeda-beda maka penelitian terkait penerapan siskeudes perlu dikaji ulang terkait penerapannya apakah sudah benar efektif atau hanya diterapkan karena perintah pemerintah pusat untuk beralih menggunakan sistem keuangan tersebut.

Serta adanya melihat perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya peneliti berupaya untuk mendapatkan info lebih dalam untuk mengetahui peran sistem keuangan desa dalam meningkatkan kualitas akuntabilitas keuangan di Desa Kirig, serta bentuk partisipasi

masyarakat yang ada. Dengan adanya masalah tersebut peneliti melakukan penelitian tentang “Analisis Siskeudes dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Partisipasi Masyarakat Desa Kirig”.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dijadikan sebagai panduan saat melakukan penelitian sebagai upaya dalam pengumpulan informasi dan sebagai panduan untuk membahas dan menganalisis hingga penelitian memperoleh hasil yang ingin dicapai. Fokus dari penelitian ini adalah peneliti ingin menganalisis bahwa apakah penerapan sistem keuangan desa yang disusun kantor kepala desa Kirig sudah baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan desa dan partisipasi masyarakat.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Kirig?
2. Bagaimana Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kirig?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Kirig
2. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kirig

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan sistem keuangan desa terkait dengan proses pengelolaan keuangan desa berbasis *online* dengan menggunakan *software*. Dan selain itu diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya sebagai pengembangan penelitian terkait sistem keuangan desa, agar nantinya sistem keuangan desa ini bisa lebih banyak yang mengetahui, tidak hanya dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Manfaat praktis

Data hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan kepada pemerintah desa agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dengan semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya, sehingga apa yang diinginkan dari sistem

tersebut dapat tercapai yaitu meningkatkan tingkat efisiensi dan efektivitas, serta memanfaatkannya dalam upaya peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran serta garis-garis besar dari masing-masing bagian yang saling berhubungan, sehingga nantinya akan diperoleh penelitian yang sistematis dan ilmiah. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti susun:

### **1. Bagian awal**

Bagian awal ini terdiri dari: Halaman judul, Persetujuan pembimbing, lembar pengesahan kelulusan, pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

### **2. Bagian isi**

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab, dimana antara bab I dengan bab lainnya saling berkaitan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab itu adalah sebagai berikut:

#### **BAB I: Pendahuluan**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II: Kajian Pustaka**

Bab ini berisi tentang kajian teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran serta pertanyaan penelitian.

#### **BAB III: Metode penelitian**

Bab ini meliputi pembahasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV: Hasil penelitian dan pembahasan**

Bab ini menjelaskan gambaran secara singkat mengenai sistem keuangan desa, memuat data-data yang diperoleh dalam penelitian dan hasil analisis data.

#### **BAB V: Penutup**

Bab penutup berisi kesimpulan penelitian dan saran.

3. Bagian akhir

Bagian terakhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran terkait penelitian dan daftar riwayat pendidikan peneliti.

